

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
MAKASSAR**

Semester I 2026

CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir
30 Juni 2026

Jl .Bandara Baru,
Bandar Udara Sultan Hasanuddin,
Makassar



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan semester I Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

Makassar, Juli 2026
Kepala,

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196902192002121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Pernyataan Tanggung Jawab	7
Ringkasan	8
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	14
A. Penjelasan Umum	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	47

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, Juli 2026
Kepala,

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196902192002121003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan semester I Tahun 2026 Balai Besar Kekarantina Kesehatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada semester I TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.857.921.561,- atau mencapai 13 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.5.900.000.000,-

Realisasi Belanja Negara hingga sem I TA 2026 adalah sebesar Rp.30.499.685.000,- Terdiri atas belanja pegawai: Rp.11.017.999.535,-; belanja barang : Rp.3.538.012.849,- dan belanja modal : Rp.231.333.000,- Realisasi belanja hingga 30 Juni 2026 mencapai 48% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 30.499.685.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas hingga 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp.39.869.995.575,- yang terdiri dari: Aset Lancar dan Aset Tetap. Aset Lancar per 30 Juni 2026 senilai Rp.775.618.126,- berupa Persediaan senilai Rp.729.639.526,-; Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 38.000.000,-; dan Kas dan Setara Kas Lainnya sebesar Rp.7.978.600,-. Aset Tetap (neto) per 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp.39.093.529.115,-; terdiri dari : Aset Tanah senilai Rp.18.083.526.373,-; peralatan dan mesin senilai Rp.34.069.033.629,-; Gedung dan Bangunan sebesar Rp.21.921.105.341,-; Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 127.816.000,-; nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 sebesar (Rp.35.107.952.228,-); Aset Lainnya (neto) pada 30 Juni 2026 sebesar

Rp.848.334,- terdiri atas : Aset Lain-lain senilai Rp. 4.713.943.402,- dan akumulasi penyusutan/amortisasi Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 sebesar (Rp.4.713.095.068,-). Pada sisi Passiva terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Ekuitas. Kewajiban jangka pendek per 30 Juni 2026 senilai Rp.725.496.025,-; terdiri dari: Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp.665.405.825,-; Utang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 22.090.200,-; dan Uang muka dari KPPN sebesar Rp.38.000.000,-. Nilai Ekuitas per 30 Juni 2026 disajikan sebesar Rp.39.144.499.550,- sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 39.869.995.575,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.861.397.394,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.18.041.820.365,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.16.180.422.971,-). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan sebesar Rp.170.000,- dan Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,- sehingga Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa (Rp.16.180.252.971,-). Pada semester I Tahun Anggaran 2026 diperoleh Defisit LO sebesar (Rp.16.180.252.971,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada semester I TA 2026 Laporan Ekuitas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar disajikan sebagai berikut: Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp.42.383.428.698,-. Defisit LO sebesar (Rp.16.180.252.971,-). Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp. (0,-). Transaksi antar entitas senilai Rp.12.941.323.823,- terdiri atas : Ditagihkan Ke Entitas Lain Rp.14.787.345.384,- ; Diterima dari Entitas Lain (Rp.1.857.921.561,-); Transfer Masuk Rp.11.900.000,-, sehingga Kenaikan/Penurunan ekuitas sebesar (Rp.3.238.929.148,- sehingga Ekuitas Akhir entitas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.39.144.499.550,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada semester I tahun 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 2025

Tabel I. Laporan Realisasi Anggaran (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Sem I 2026		% thd Angg	2025		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		Anggaran	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.900.000.000	1.857.921.561	31,49	2.231.850.000	3.125.955.000	140
JUMLAH PENDAPATAN		5.900.000.000	1.857.921.561	31,49	2.231.850.000	3.125.955.000	140
BELANJA							
Belanja Pegawai	B.2	21.737.872.000	11.017.999.535	50,69	20.010.013.000	14.699.196.809	73
Belanja Barang	B.3	8.328.864.000	3.538.012.849	42,48	10.052.337.000	7.636.214.668	76
Belanja Modal	B.4	432.949.000	231.333.000	53,43	305.150.000	298.880.845	98
JUMLAH BELANJA		30.499.685.000	14.787.345.384	48,48	30.367.500.000	22.634.292.322	74,53

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR NERACA PER 30 September 2025 dan 2024

Tabel II. Neraca Per 30 September 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Sep-25	2024	Kenaikan (Penurunan)	
ASET				Jumlah	%
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	36.000.000	-	36.000.000	
Belanja Dibayar Dimuka		-	-	-	
Persediaan	C.2	2.290.727.322	706.191.556	1.584.535.766	224,38%
Jumlah Aset Lancar		2.326.727.322	706.191.556	1.620.535.766	229,48%
ASET TETAP					
Tanah	C.3	18.083.526.373	18.083.526.373	-	-
Peralatan dan Mesin	C.4	33.190.469.955	31.879.479.345	1.310.990.610	4,11%
Gedung dan Bangunan	C.5	21.921.105.341	21.921.105.341	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	127.816.000	127.816.000	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(33.513.229.027)	(32.086.097.151)	(1.427.131.876)	4,45%
Jumlah Aset Tetap		39.809.688.642	39.925.829.908	(116.141.266)	-0,29%
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.8	-	-	-	#DIV/0!
Aset Lain-Lain	C.9	4.114.861.402	4.114.861.402	-	0,00%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(4.112.974.734)	(4.107.173.004)	(5.801.730)	0,14%
Jumlah Aset Lainnya		1.886.668	7.688.398	(5.801.730)	-75,46%
JUMLAH ASET		42.138.302.632	40.639.709.862	1.498.592.770	3,69%
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Pada Pihak Ketiga	C.11	665.319.619	31.516.965	633.802.654	20,11
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.12	27.225.875	-	27.225.875	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.13	-	3.125.000	(3.125.000)	-
Uang Muka dari KPPN	C.14	36.000.000	-	36.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		728.545.494	34.641.965	693.903.529	2003,07%
JUMLAH KEWAJIBAN		728.545.494	34.641.965	693.903.529	2003,07%
EKUITAS					
Ekuitas	C.15	41.409.757.138	40.605.067.897	804.689.241	1,98%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.138.302.632	40.639.709.862	1.498.592.770	3,69%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026

Tabel III. Laporan Operasional Per 30 Juni 2026 dan 2025 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-26	2025	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.861.397.394	3.129.080.000	(1.267.682.606)	-40,51%
JUMLAH PENDAPATAN		1.861.397.394	3.129.080.000	(1.267.682.606)	-40,51%
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	11.675.426.760	11.521.552.087	153.874.673	1,34%
Beban Persediaan	D.3	1.899.262.165	54.083.807	1.845.178.358	3411,70%
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.966.413.426	1.611.043.620	355.369.806	22,06%
Beban Pemeliharaan	D.5	222.316.132	259.045.585	(36.729.453)	-14,18%
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.174.257.849	769.492.255	404.765.594	52,60%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.104.144.033	995.166.606	108.977.427	10,95%
Beban Penyisihan Piutang			-	-	0,00%
JUMLAH BEBAN		18.041.820.365	15.210.383.960	2.831.436.405	18,62%
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.180.422.971)	(12.081.303.960)	(4.099.119.011)	33,93%
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-	-	-	0,00%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	D.10	-	-	-	0,00%
<i>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</i>		-	-	-	0,00%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	170.000	-	170.000	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	D.12	-	-	-	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Tahun anggaran yang lalu	D.13	-	-	-	0,00%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	D.14	-	-	-	0,00%
<i>Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>		170.000	-	170.000	0,00%
<i>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>		-	-	-	0,00%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	-	-	-	0,00%
Beban Persediaan Rusak/Usang	D.16	-	-	-	0,00%
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		(16.180.252.971)	-	(16.180.252.971)	0,00%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(16.180.252.971)	-	(16.180.252.971)	0,00%
POS LUAR BIASA		-	-	-	0,00%
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(16.180.252.971)	(12.081.303.960)	(4.098.949.011)	33,93%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 2025

Tabel IV. Laporan Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2026 dan 2025 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-26	2025	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	42.383.428.698	40.605.067.897	1.778.360.801	4,38%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16.180.252.971)	(12.081.303.960)	(4.098.949.011)	33,93%
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-	-	#DIV/0!
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3	-	-	-	0,00%
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	-	-	-	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.5	-	-	-	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	12.941.323.823	13.030.914.623	(89.590.800)	-0,69%
Ditagihkan Ke entitas Lain	E.3.1	14.787.345.384	13.681.290.713	1.106.054.671	8,08%
Diterima dari Entitas Lain	E.3.2	(1.857.921.561)	(3.125.955.000)	1.268.033.439	-40,56%
Transfer Keluar		-	-	-	0,00%
Transfer Masuk	E.3.3	11.900.000	2.475.578.910	(2.463.678.910)	0,00%
Pengesahan Hibah Langsung	E.3.4	-	-	-	0,00%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(3.238.929.148)	949.610.663	(4.188.539.811)	0,00%
EKUITAS AKHIR	E.5	39.144.499.550	41.554.678.560	(2.410.179.010)	-5,80%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar

Kekarantinaan Kesehatan Makassar

Dasar Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan. *Hukum* Organisasi dan tata kerja entitas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo *Entitas dan* Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang *Rencana* Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa KKP terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi. *Strategis*

Wilayah Kewenangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar (BBKK Makassar) terdiri dari Induk di Bandara Sutan Hasanuddin dan 9 (sembilan) wilayah kerja yang tersebar di 2 (Dua) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Pelabuhan Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Khusus Biringkassi, Pelabuhan Pare-Pare, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Bajo'E, Pelabuhan Palopo, dan Pelabuhan Malili. Wilayah Kerja di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pelabuhan Belang-belang dan Bandara Tampapadang.

Entitas berkedudukan di Jalan Bandara Baru, Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar mempunyai tugas pokok pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular, penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit yang

muncul kembali, survailans epidemiologi, kekarantinaaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara dan lintas batas darat negara.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan kekarantinaaan
- b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
- c. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potesial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
- f. Pelasanaan sentra/simpul jejaring survailans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan Internasional
- g. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
- h. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA export dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import
- j. Pelaksanaan Pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya
- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara

- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaaan, pengendalian resiko lingkungan, dan survailans keshatan pelabuhan
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KKP.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berkomitmen dengan visi ***“Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Makassar yang Tangguh dan Prima dalam Cegah Tangkal Faktor Resiko untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara”***

Untuk terciptanya Visi tersebut dirumuskan misi Balai Besar Kekarantinaaan Kesehatan Makassar, antara lain :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan Bandara melalui pelaksanaan cegah tangkal penyakit Karantina, penyakit menular dan PHEIC
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandara melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani
- c. Mencegah timbulnya penyakit melalui penyelenggaraan pengendalian resiko lingkungan
- d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengendalian dan pencegahan penyakit di wilayah kerja BBKK Makassar.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan triwulan III Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau

dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5)Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan

berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel V: Tabel Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun
--	---------

*Piutang
Jangka
Panjang*

- d. Piutang Jangka Panjang**
- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- e. Aset Lainnya**
- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
 - Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
 - Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
 - Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Tabel VII. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam periode semester I Tahun 2026 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar telah merevisi sebanyak 3 (tiga) kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

*Realisasi
Pendapatan
Rp.1.857.510.
000 -*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 1.857.510.000,- atau mencapai 31,49 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.5.900.000.000,-. Pendapatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar terdiri dari:

1. Jasa Layanan Fasilitas Kesehatan Rp. 93.265.000,-
2. Jasa Karantina Kesehatan sebesar Rp.625.080.000,-
3. Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan sebesar Rp.1.139.165.000,-
4. Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah Rp.240.650,- adalah denda atas pekerjaan pengadaan media KIE oleh CV. Sany Sejahtera Rp. 154.980,-; CV Arrow Media Creative atas pengadaan jerigen dan perangkat tikus Rp. 65.400,-; CV Citra persada atas pekerjaan pengadaan Trolley sebesar Rp. 20.270,-
5. Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu Rp. 170.000,- adalah pengembalian kelebihan pembayaran piket PHEIC bulan desember 2025 an, Serdi, SKM dan Abd Gani Buatan, SKM masing-masing sebesar Rp.85.000,-.

Tabel VIII
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Sem I Tahun 2026

AKUN	Uraian	30-Jun-26		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	254.700.000	93.265.000	36,62
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatn	1.122.050.000	625.080.000	55,71
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	4.523.250.000	1.139.165.000	25,18
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	240.650	-
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	911	
425912	Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	-	170.000	
Jumlah		5.900.000.000	1.857.921.561	31,49

Realisasi Pendapatan pada semester I TA 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada TA 2024 yakni sebesar 6%, Hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan pelayanan vaksin Meningitis dan vaksin lainnya untuk Jemaah Umroh dikarenakan telah dibukanya kerjasama layanan vaksin di unit pelayanan swasta (klinik dan rumah sakit).

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja Negara
Rp.14.787.345.384,-

Realisasi Belanja instansi pada semester I TA 2026 adalah sebesar Rp.14.787.345.384,- atau 48% dari anggaran belanja sebesar Rp.30.499.685.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada semester I TA 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel IX Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2026

Uraian	Semester I (30 Juni 2026)		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	21.737.872.000	11.017.999.535	50,69%
Belanja Barang	8.328.864.000	3.538.012.849	42,48%
Belanja Modal	432.949.000	231.333.000	53,43%
Jumlah	30.499.685.000	14.787.345.384	48,48%

Prosentase Realisasi Belanja pada semester I TA 2026 mengalami peningkatan 8.8% dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal pada semester I 2026.

Tabel X :Perbandingan Realisasi Belanja semester I TA 2026 dan 2025

URAIAN	Realisasi Belanja Sem I TA 2026	Realisasi Belanja Sem I TA 2025	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	11.017.999.535	10.877.729.494	1,29
Belanja Barang	3.538.012.849	2.654.395.609	33,29
Belanja Modal	231.333.000	149.165.610	55,08
Jumlah	14.787.345.384	13.681.290.713	8,08

Belanja
Pegawai
Rp.11.017.999.
535,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada semester I TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.11.017.999.535,- dan Rp.10.877.729.494,- . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai pada sem I TA 2026 mengalami kenaikan sebesar 1,29 persen dibandingkan pada periode yang sama pada TA 2025, hal ini disebabkan

oleh adanya pegawai yang beralih ke jenjang jabatan fungsional tertentu serta kenaikan gaji berkala pegawai.

Belanja

Barang Rp.

3.538.012.849,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada semester I TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.538.012.849,- dan Rp.2.654.395.609,-. Realisasi Belanja Barang pada semester I TA 2026 mengalami kenaikan sebesar 33.29% dibandingkan realisasi Belanja Barang pada periode yang sama di tahun 2025. Hal ini antara lain disebabkan oleh naiknya belanja keperluan perkantoran dalam rangka menunjang kegiatan operasional kanor pada tahun 2025.

Belanja Modal

Rp.231.333.000

,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada semester I TA 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.231.333.000,- dan Rp.149.165.610,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal pada semester I tahun 2026 adalah berupa belanja modal peralatan dan mesin. Uraian mengenai belanja modal ini akan ungkapkan pada penjelasan atas pos-pos neraca pada belanja aset peralatan dan mesin.

B.6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar pada periode Juni 2026 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XI. Rincian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2025

NO	Uraian	Nilai
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Hal III DIPA	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP/TUP	10
7	Capaian Output	25
Total Nilai		100

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.38.000.000
,-*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara adalah sejumlah uang tunai TUP/GUP dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran yang akan digunakan sebagai operasional dan mendukung kegiatan perkantoran. Kas di bendahara pengeluarab per 30 Juni 2025 sebesar Rp.38.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Kas Bank :Rp.38.000.000,-
- Tunai :Rp. 0,-

*Kas dan
Setara Kas
Lainnya
Rp.7.978.600,-*

C.2 Kas dan Setara Kas Lainnya

Kas dan setara kas lainnya lainnya pada BBKK Makassar adalah rekening pemerintah lainnya yang dibuat dengan tujuan menerima pembayaran pihak ketiga atas jasa layanan kekarantinaaan BBKK Makassar.

*Persediaan
Rp.
729.639.529,-*

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.729.639.529,- dan Rp. 2.420.572.046,-. Persediaan adalah aset lancar dalam

bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar diperoleh dari Belanja Rutin.

Tabel XIII. Rincian Persediaan
per 30 Juni 2026 dan 2025

Jenis	Jenis	Sem I 2026	2025
117111	Barang Konsumsi	426.488.192	379.944.164
117113	Barang untuk Pemeliharaan	-	2.264.750
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/diserahkan ke Masyarakat	-	-
117199	Persediaan Lainnya	303.151.334	323.982.642
Jumlah		729.639.526	706.191.556

Persediaan pada semester I tahun 2026 dalam kondisi baik.

Tanah
Rp.18.083.526
.373,-.

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.18.083.526.373,-. Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XIV. Rincian Tanah Per 30 Juni 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	120	Tanah Rumah dinas Parepare	86.904.000
2	204	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.794.189.000
3	12.160	Tanah Wilker Bandara Tampa Padang Mamuju - Sulawesi Barat	388.500.000
4	4.000	Tanah Kantor Induk	8.942.400.000
5	1.230	Tanah Bangunan Kantor Parepare	1.321.943.000
6	1.360	Tanah Bangunan Wilker Bajoe	1.242.496.000
7	2.531	Tanah Bangunan Wilker Palopo	2.405.343.000
8	999	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	634.941.525
9	1.200	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Wilker Pasangkayu)	147.967.718
10	800	Tanah Wilker Awerange	797.429.630
11	1.000	Tanah Wilker Bira	321.412.500
JUMLAH			18.083.526.373

Peralatan dan
Mesin
Rp.34.637.168
.829,-

C.4. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah Rp. 34,637.168.829,- dan Rp.34.436.782.629,-. Penambahan belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar 0.58% diperoleh dari belanja modal BBKK Makassar selama periode 1 januari 2026 hingga 30 Juni 2026. Belanjn\ modal semester I 2026 adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Per Unit	Jumlah Harga	Keterangan
I	Pembelian				
1	Alat Ukur Lainnya	1	23.310.000	23.310.000	
2	Lemari Penyumpan	1	14.430.000	14.430.000	
3	AC	1	10.545.000	10.545.000	
4	AC	1	5.772.000	5.772.000	
5	Handy Talky	3	2.394.000	7.182.000	
6	Handy Talky	1	2.393.997	2.393.997	
7	Emergency Trolly	1	4.500.000	4.500.000	
8	Nebulizer	1	6.653.063	6.653.063	
9	Portabel ECG AC/DC 1 chanel	1	49.953.940	49.953.940	
10	Incubator	1	8.893.235	8.893.235	
11	PH Meter Digital	2	1.875.900	3.751.800	
12	Sprayer	6	1.132.200	6.793.200	
13	Tes Tube Dry Bath	1	12.765.000	12.765.000	
14	Photo Meter	1	74.389.765	74.389.765	
Jumlah				231.333.000	
II	Transfer Masuk				
15				-	
Jumlah				-	
Total : (I+II)				231.333.000	

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	34.436.782.629
Mutasi tambah:	
Pembelian	231.333.000
Reklas aset lainnya ke aset tetap	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan Aset	0
Reklas aset tetap ke aset lainnya	-599.082.000
Saldo per 30 September 2025	34.069.033.629
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2025	-872.928.624
Nilai Buku per 30 Juni 2026	33.196.105.005

Gedung dan Bangunan
Rp.21.921.105.341

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp. 21.921.105.341,-. Tidak ada penambahan maupun pengurangan saldo Gedung dan bangunan pada periode tersebut.

C.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp. 127.816.000,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.127.816.000,-. Tidak terjadi kenaikan/penurunan dikarenakan tidak ada transaksi pembelian maupun penghapusan pada periode tersebut.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(Rp.35.107.952.228,-)

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar (Rp.35.107.952.228,-) dan (Rp.34.603.409.360,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel XVI. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Semester I TA 2026

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Per 30 Juni 2026	Akumulasi Penyusutan 2025	Naik/Turun (%)
1	Peralatan dan Mesin	30.083.786.275	27.754.019.932	1,08
2	Gedung dan Bangunan	4.918.124.953	4.227.292.469	1,16
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	106.041.000	104.784.750	1,01
Akumulasi Penyusutan		35.107.952.228	32.086.097.151	1,09

Aset Tak
Berwujud Rp.
0,-

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Kekarantinaan Makassar berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Aset Lain-lain
Rp.4.713.943.
402,-

C.9. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.4.713.943.402,- dan Rp. 4.114.861.402,-. Penambahan nilai aset lain-lain merupakan reklas aset tetap ke aset lainnya berupa kendaraan taktis. Seluruh seta lain lain sedang dalam proses penghapusan.

Akumulasi
Penyusutan
Dan
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp.4.713.095.
068,-)

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp.4.713.095.068,-) dan (Rp.4.113.493.903,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel XVIII. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 30 Juni 2026

Aset LAINNYA	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
Aset Tak Berwujud	1.400.000	1.400.000
Aset Lain-lain	4.712.543.402	4.711.695.068
Jumlah	4.713.943.402	4.713.095.068

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp.
665.405.825,-

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 665.405.825,- adalah merupakan gaji dan tunjangan pegawai bulan Juli 2026, yang akan dibayarkan pada tanggal 01 Juli 2026, namun permohonan pembayarannya telah disampaikan pada bulan Juni 2026.

Hutang yang belum ditagihkan
Rp.22.090.200
,-

C.12. Hutang Yang Belum Ditagihkan

Hutang yang belum ditagihkan sebesar Rp. 22.090.200,- adalah belanja yang menggunakan kartu kredit pemerintah atau Uang Persediaan Kantor dan akan dilakukan revolving pada bulan berikutnya.

Uang Muka dari KPPN
Rp.38.000.000
,-

C.13. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang berasal dari uang persediaan yang dipergunakan untuk belanja operasional kantor. Uang muka dari KPPN pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.38.000.000,-

C.14 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan di terima dimuka adalah pendapatan yang diterima pada tahun berjalan namun manfaatnya akan di terima pada tahun berikutnya. Pendapatan diterima

Pendapatan Diterima Dimuka Rp.0,-

dimuka pada semester I 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.3.645.833,- adalah sewa kantin KPN Arwana pada tahun 2025 selama setahun. Sewa dimulai pada bulan Juli 2025 hingga Juli 2026.

*Ekuitas
Rp.39.144.499
.550,-*

C.15. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang dihitung daei selisih antara total sset dan kewajiban (liabilitas) pada tanggal pelaporan dan dikeloal untuk kepentingan publik. Nilai ekuitas pada 30 Juni 2026 adalah Rp.39.144.499.550,-. Penjelasan mengenai ekuitas akan di bahas pada bagian Laporan ekuitas sem I BBKK Makassar.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
Operasional
Rp.1.861.397.
394,-*

D.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.1.861.397.394,- dan Rp.3.129.080.000,-. Adapun rincian pendapatan operasional pada semester I tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel XIX.

Rincian Pendapatan Operasional Per 30 Juni 2026

AKUN	URAIAN	30-Jun-26	30-Jun-25	NAIK (TURUN) %
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.645.833,	3.125.000,	116,67%
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	93.265.000,	146.285.000,	63,76%
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	625.080.000,	580.000.000,	107,77%
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	1.139.165.000,	2.399.670.000,	47,47%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	911,	0,	0,00%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	240.650,	0,	0,00%
Jumlah		1.861.397.394	3.129.080.000	59,49%

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya mengalami penurunan hingga 59.49 % hal ini disebabkan oleh menurunnya permintaan vaksin jemaah umroh dan bertambahnya kerjasama dengan klinik penyelenggara vaksin meningitis.

*Beban
Pegawai
Rp.11.675.426.
760,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada sem I Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.11.675.426.760,- dan Rp.11.521.552.087,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan deng6n pembentukan modal.

*Tabel XX. Rincian Beban Pegawai
Sem I TA 2026 dan 2025*

Akun	Uraian	Sem I 2026	2025	Kenaikan /Penurunan	NAIK (TURUN) %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	4.380.605.900,	4.405.869.500,	-25.263.600,	10057,67%
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-85,	58.726,	-58.811,	-6908941,18%
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	56.801,	284.958.520,	-284.901.719,	50167870,28%
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	278.256.560,	103.480.550,	174.776.010,	3718,89%
511122	Beban Tunj. Anak PNS	105.221.748,	24.310.000,	80.911.748,	2310,36%
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23.085.000,	509.925.000,	-486.840.000,	220890,19%
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	529.637.000,	66.579.760,	463.057.240,	1257,08%
511125	Beban Tunj. PPh PNS	66.491.385,	225.805.560,	-159.314.175,	33960,12%
511126	Beban Tunj. Beras PNS	224.646.840,	342.597.000,	-117.950.160,	15250,47%
511129	Beban Uang Makan PNS	347.824.000,	26.455.000,	321.369.000,	760,59%
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	22.195.000,	-370.000,	22.565.000,	-166,70%
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	243.691.398,	189.704.839,	53.986.559,	7784,63%
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.072,	3.384,	1.688,	6671,92%
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	10.919.156,	8.117.380,	2.801.776,	7434,07%
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2.258.926,	729.036,	1.529.890,	3227,36%
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	24.863.332,	18.586.666,	6.276.666,	7475,53%
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	10.748.335,	7.266.140,	3.482.195,	6760,25%
511628	Beban Uang Makan PPPK	24.298.000,	20.681.000,	3.617.000,	8511,40%
512211	Beban Uang Lembur	80.935.000,	69.495.000,	11.440.000,	8586,52%
512212	Beban Uang Lembur PPPK	3.075.000,	1.357.000,	1.718.000,	4413,01%
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5.051.500.113,	5.021.684.598,	29.815.515,	9940,98%
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	245.112.279,	194.257.428,	50.854.851,	7925,24%
Jumlah		11.675.426.760	11.521.552.087	153.874.673	12,86%

Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 12.86%, hal ini disebabkan oleh adanya peralihan pegawai ke fungsional tertentu dari fungsional umum serta kenaikan gaji berkala pegawai.

Beban
 Persediaan
 Rp.1.899.262.
 165,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Sem I Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.1.899.262.165,- dan Rp.54.083.807,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada Sem I Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XXI. Rincian Beban Persediaan
Sem. I TA 2026 dan 2025

Akun	URAIAN	Sem I 2026	TW III TH 2024
593111	Beban Persediaan Konsumsi	434.594.905	54.083.807
593146	Beban Persediaan Lainnya	1.464.667.260	-
Jumlah		1.899.262.165	54.083.807

Beban Persediaan pada semester I 2026 mengalami peningkatan sebesar 54.07% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh meingkatnya kebutuhan dan penggunaan persediaan konsumsi dan persediaan lainnya dalam rangka mendukung operasional kantor.

Beban Barang
dan Jasa
Rp.1.966.413.
426,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada semester I Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.1.966.413.426,- dan Rp.1.611.043.620,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada triwulan III Tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XXII. Rincian Beban Barang dan Jasa
Semester I TA 2026 dan 2025

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Sem I 2026	Sem I TH 2025	Jumlah	NAIK (TURUN) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	100.342.166	135.426.480	-35.084.314	-25,91%
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	255.000	80.544.000	-80.289.000	0,00%
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	77.100.000	17.721.000	59.379.000	335,08%
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	13.400.000	79.831.401		
521211	Beban Bahan	352.185.251	2.725.400	349.459.851	12822%
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	590.000	157.712.633		
522111	Beban Langganan Listrik	189.371.533	3.264.406	186.107.127	0,00%
522112	Beban Langganan Telepon	4.528.134	2.729.300	1.798.834	65,91%
522113	Beban Langganan Air	2.466.750	323.510.000	-321.043.250	-99,24%
522141	Beban Sewa	305.062.489	807.579.000	-502.516.511	0,00%
522151	Beban Jasa Profesi	2.700.000	0	2.700.000	#DIV/0!
522191	Beban Jasa Lainnya	918.412.103	0	918.412.103	
Jumlah		1.966.413.426	1.611.043.620	355.369.806	22,06%

Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan sebesar 22.06%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban keperluan perkantoran selama periode semester I 2026.

Beban
Pemeliharaan
Rp.222.316.132,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan semester I Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.222.316.132,- dan Rp.259.045.585,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan pada sem I tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XXIII. Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2026 dan 2025

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Sem I.TH 2026	Sem I TH. 2025	Jumlah	NAIK (TURUN) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	221.791.132,	50.695.810,	171.095.322	337,49%
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,	208.199.429,	-208.199.429	-100,00%
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	525.000,	150.346,		
Jumlah		222.316.132	259.045.585	-36.729.453	-14,18%

Beban pemeliharaan selama periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar 14.18% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya beban pemeliharaan gedung dan bangunan serta beban persediaan bahan untuk pemeliharaan kantor, dikarenakan telah tersedianya beberapa barang pada periode yang lalu.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.1.174.257.
849,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada semester I Tahun 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.1.174.257.849,- dan Rp.769.492.255,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas semester I untuk TA 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XXIV. Rincian Beban Perjalanan Dinas
Semester I TA 2026 dan 2025

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Sem I 2026	Sm I 2026	Jumlah	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	146.143.949,	604.204.255,		0,00
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.028.113.900,	165.288.000,	862.825.900	522,01%
Jumlah		1.174.257.849	769.492.255	404.765.594	52,60%

Beban perjalanan dinas mengalami kenaikan sebesar 52.60% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya perjalanan dinas biasa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di wilker Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.1.104.144.
033,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.104.144.033,- dan Rp.995.166.606,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi semester I tahun 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XXV. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester I TA 2026 dan 2025

AKUN	URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Sem I 2026	Sem I 2025	Jumlah	NAIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	872.928.624,	758.668.632,	114.259.992	15,06%
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	230.277.494,	230.277.494,	-	0,00%
591313	Beban Penyusutan Jaringan	418.750,	418.750,	-	0,00%
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	519.165,	5.801.730,	(5.282.565)	-91,05%
Jumlah Penyusutan		1.104.144.033	995.166.606	108.977.427	10,95%

Beban penyusutan dan amortisasi pada sem I mengalami kenaikan sebesar 10.95%, hal ini disebabkan oleh bertambahnya asset peralatan dan mesin dan Jaringa diakibatkan rusak berat dan tidak dipergunakan lagi dalam operasional kantor serta telah dialihkan menjadi asset lain-lain untuk selanjutnya akan dilakukan lelang penghapusan.

Pendapatan
Dari Penjualan
Peralatan dan
Mesin Rp.0,-

Beban

Kerugian

Pelepasan
Aset Rp.0,-

Surplus
(Defisit) Dari
Kegiatan Non
perasional
(Rp.170.000,-)

Surplus/
(Defisit) LO
(Rp.16.180.25
2.971,-)

D.8. Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin pada semester I tahun 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

D.9. Beban Kerugian Pelepasan Aset

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan pada semester I tahun 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

D.10. Surplus/Defist Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kegiatan Non Operasional pada sem I TA 2026 dan 2025 mengalami defisit sebesar 0) dan (Rp.170.000,-). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah merupakan selisih dari Pendapatan Non Operasional dengan Beban Non Operasional.

D.11. Surplus/Defisit LO

Pada semeste I TA 2026 dan 2025 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar mengalami defisit LO, masing-masing sebesar (Rp.16.180.251.971,-) dan (Rp.12.081.303.960,-) adalah merupakan selisih antara

Pendapatan LO dan Beban LO pada triwulan III tahun 2025.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.42.383.428.698,-)*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada semester I 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.42.383.428.698,- dan Rp.40.605.067.897,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

*Defisit LO
(Rp.16.180.252.971,-)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 sebesar (Rp.16.180.252.971,-) dan (Rp.12.081.303.960,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar Entitas
Rp.12.941.323.823,-)*

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.12.941.323.823,- dan Rp.13.030.914.623,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel XXVII. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Semester I TA 2026 dan 2025

Ditagihkan Ke
Entitas Lain
Rp.
14.787.345.38
4,-

Diterima Dari
Entitas Lain
(Rp.3.125.955.
000,-)

Transfer
Masuk Rp.
11.900.000,-

AKUN	Transaksi Antar Entitas	Sem I 2026	Sem I 2025	Naik/Turun (%)
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	14.787.345.384,	13.681.290.713,	92,52%
313121	Diterima dari Entitas Lain	-1.857.921.561,	-3.125.955.000,	168,25%
313221	Transfer Masuk	11.900.000,	2.475.578.910,	20803,18%
Jumlah		12.941.323.823,	13.030.914.623	11.86%

E.3.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode semester I TA 2026 dan 2025, Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp.14.787.345.384,- dan Rp. 13.681.290.713,-.Ditagihkan ke entitas lain mengalami kenaikan sebesar 92.52% diakibatkan oleh mweningkatnya belanja batrang dan jasa selama periode semester I 2026.

E.3.2 Diterima Dari Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode semester I TA 2026 dan 2025 sebesar (Rp.1.857.921.561,-) dan (Rp.3.125.955.000,-) selama periode semester I mengalami penurunan sebesar 168.25%, hal ini disebabkan oleh menurunnya realisasi pendapatan negara bukan pajak selam periode semester I 2026.

E.5.3. Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk pada semester I 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.11.900.000,- dan Rp.2.475.578.910,- Transfer masuk selama periode semester I 2026 adalah Buku ICV (International Certificate of Vaccination) dari

Ekuitas Akhir Direktorat Sorvelans dan Karantina Kesehatan
Rp. Kemenkes RI.
39.144.499.550

,-

E.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada semester I 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.39.144.499.550,- dan Rp.41.554.678.560,-. Ekuitas akhir adalah nilai kekayaan bersih pemerintah/instansi pada periode tertentu, yang dihitung dari ekuitas awal ditambah/dikurangi dengan transaksi antar entitas.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Instalasi.

Uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelola data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kersipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.
2. Instalasi
 - a. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makassar
 - b. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi
3. Wilayah Kerja
 - a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Makassar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
 - b. Dipimpin oleh kepala wilayah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala BBKK Makassar
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional
4. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Ketua Tim Kerja
 - b. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
 - d. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasarkan atas analisis beban kerja

- e. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan